“UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI RISIKO BANJIR DI ACEH TAMIANG”

S K R I P S I

Diajukan Oleh:

IMELDA NATSYA

NIM. 190801017

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

DARUSSALAM – BANDA ACEH

2023 M/1444 H

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imelda Natsya

NIM : 190801017

Program Studi : Ilmu Politik

Nama Universitas : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dengan ini saya yang bertanda tangan menyatakan bahwa skripsi ini :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naska karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur yang termasuk pernyataan diatas, maka saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang menyatakan,

Imelda Natsya

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI RESIKO BANJIR DI ACEH TAMIANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

IMELDA NATSYA

NIM . 190801017

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Muhammad Thalal, Lc., MSi., M.Ed	**Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc.**
NIP. 197810162008011011	**NIDN. 2007017903**

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI RISIKO BANJIR DI ACEH TAMIANG

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus
Serta Di Serahkan Sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik Diajukan Oleh :

Imelda Natsya
NIM. 190801017

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Juli 2023
30 Muharram 1445 H
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,	**Sekertaris,**
Muhammad Thalal, Lc., MSi., M.Ed	**Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc., M.PM**
NIP. 197810162008011011	**NIDN. 2007017903**
Penguji I,	**Penguji II,**
Eka Januar, M.Soc.Sc	**Dr. Dede Suhendra, Sos., M.H**
NIP. 198401012015031003	

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penyebab utama terjadinya banjir di Aceh Tamiang dikarenanakan faktor alam dan faktor manusia, faktor alam karena puluhan tahun sendimentasi sungai di Aceh Tamiang yang tinggi sekali. Banjir yang terjadi selain merendam pemukiman penduduk juga melumpuhkan jalan Arus lalu lintas nasional Banda Aceh-Medan. Faktor manusia diakibatkan lebih dari 50% penggunakan APL (Area Penggunaan Lain) yang dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar disetiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Pertanyaan penelitian dalam skipsi ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang dan bagaimana kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dan menggunakan penelitian Kepustakaan *(Library Research)* dan Penelitian Lapangan *(Field Research).* Hasil penelitian yang didapatkan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang yaitu Pemerintah Daerah menyiapkan beberapa kebijakan, seperti membangun empat tanggul, membentuk kader-kader siaga bencana disetiap kampung, melakukan penanaman vetiver, dan membuat sosialisasi. Pemerintah Daerah juga membentuk tiga sektor Satgas bencana yaitu BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah Aceh Tamiang juga memiliki Lumbung Sosial yang berada di 4 titik Kecamatan. Kemudian, untuk hubungan kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang sangat bersinegritas, karena melibatkan tokoh masyarakat. Pemerintah Daerah juga membentuk Destana dan Relawan Tangguh. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan mulai dari prabencana, terjadinya bencana, dan pasca bencana. Kemudian, adanya sinegritas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat guna mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang. Namun, kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tamiang menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak memadai.

Katakunci: *Kebijakan Pemerintah Daerah, BPBD, Penanggulangan Banjir.*

KATA PENGANTAR

Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat serta karunia-Nya peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul "upaya pemerintah daerah dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang". Skripsi ini diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Shalawat beriringkan salam semoga tetap dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan para pengikut sampai akhir zaman.

Selama peneliti melakukan penelitian dalam pembuatan skripsi ini, peneliti menyadari skripsi ini tidak akan selesai, jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari ada begitu banyak sekali kekurangan di dalam skipsi ini, sehingga peneliti berharap bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir dari kata, semoga dalam penyelesaian skripsi ini bisa bermanfaat terkhususnya bagi peneliti dan bagi pembaca.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam, kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MAg, selaku rektor UIN Ar-raniry.
2. Dr. Muji Mulia M.Ag, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry beserta jajarannya.
3. Rizkika Lhena Darwin, M.A., selaku ketua prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A., selaku sekretaris prodi Ilmu Politik, dan Eka Januar M. Soc. Sc sebagai penasehat akademik (PA).
4. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada Muhammad Thalal, Lc.,M.Si.,M.Ed selaku pembimbing I dan Bapak Renaldi Safriansyah, S.E.,M.HSc selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta

pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penelitian skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Kepada kedua orangtua tercinta beserta keluarga besar yang telah mendo'akan, menyemangatkan dan membantu baik dari segi materil maupun non materil.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2019, yang telah memberikan masukan beserta motivasi yang tidak henti-hentinya dari kalian yang menambah daya pacu semangat peneliti untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
7. Kepada informan yang sudah memberikan banyak informasi dan pengetahuan kepada peneliti selama proses penelitian berlangsung.
8. Segenap pihak yang hadir, membantu dan memberikan masukan serta kritik konstruktif kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung pada saat penggarapan dalam penulisan skripsi ini sampai dengan selesai. Atas semua kebaikan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
9. Dan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berhasil dan mampu mencapai pada titik ini. So Proud Of My Self. Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release. Knowing what things to keep and what things to release. You can't carry all things.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Peneliti,

Imelda Natsya

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 10

1.3 Tujuan Penelitian 10

1.4 Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

2.1 Penelitian Terdahulu 12

2.2 Landasan Teori 16

2.2.1 Teori Kebijakan Publik 17

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwars III 19

2.2.3 Teori Kewenangan 22

2.2.4 Penanggulangan Bencana Banjir 24

2.2.5 Peran Pemerintah Daerah 26

BAB III METODE PENELITIAN **28**

3.1 Pendekatan Penelitian 28

3.2 Fokus Penelitian 28

3.3 Lokasi Penelitian 29

3.4 Jenis Dan Sumber Data 29

3.5 Informan Penelitian 30

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....31
BAB IV HASIL PENELITIAN 33
4.1 Profil Kabupaten Aceh Tamiang.....33
4.1.1 Kedaan Geografis 35
4.1.2 Keadaan Penduduk 36
4.2 Profil BPBD Aceh Tamiang 37
4.2.1 Visi dan Misi BPBD Aceh Tamiang 37
4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Aceh Tamiang 37
4.3 Upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi resiko banjir 38
4.4 Hubungan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat 56

BAB V PENUTUP 62
5.1 Kesimpulan 62
5.2 Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banjir adalah suatu fenomena alam yang sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terjadi ketika sungai meluap akibat jumlah air yang berlebihan melebihi kapasitas penampungannya. Banjir umumnya terjadi di dataran rendah dengan kontur yang lebih rendah. Meskipun banjir bisa dianggap sebagai peristiwa alami yang sering terjadi di berbagai daerah, dampaknya akan menjadi luar biasa ketika dirasakan oleh manusia, terutama dalam kasus banjir yang berkepanjangan yang dapat merugikan kehidupan manusia. Banjir menyebabkan masalah dan dampak negatif bagi manusia, seperti kerusakan lingkungan, infrastruktur seperti jalan, sistem penyediaan air bersih, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Kerusakan ini dapat mengganggu kehidupan manusia, aktivitas ekonomi, dan juga menurunkan kualitas lingkungan.[1]

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pada alinea ke-IV diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban dalam *"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".* Amanat tersebut dilaksanakan

[1]Yulaewati dkk, Mencerdasi Bencana,(Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia,2008), hlm. 4-5.

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama seluruh elemen bangsa, oleh karena itu perubahan pada aspek kebijakan, kelembagaan, koordinasi, dan mekanisme memungkinkan terbukanya ruang untuk partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan nasional. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas dan penyelenggaraannya di laksanakan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tingkat Pusat dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) ditingkat Daerah.[2]

Dalam amanat tersebut juga telah dituangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana pasal: (1) ayat (1), bencana dapat didefinisikan sebagai suatu *"peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis"*.[3]

Sesuai dengan pasal (18) ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

---

[2] Maula Masthura, (2022) *"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir di Aceh Utara",* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

[3]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1.

peningkatan pelayanan, pemerdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [4]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Tujuan penanggulangan bencana sesuai pasal (4) ialah sebagai berikut*: (a) melindungi seluruh masyarakat dari ancaman bencana, (b) menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang telah tersedia, (c) Menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, menyeluruh, dan terpadu, (d) Menghargai budaya lokal, (e) Membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta, (f) Mendorong semangat gotong royong, kedermawaan, dan kesetiakawanan, (g) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.* [5]

Berdasarkan definisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana pasal 1 ayat 1, Kejadian banjir di Aceh Tamiang sudah mengarah pada banjir sebagai bencana karena telah menyebabkan kerugian yang disebutkan, mengenai baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam, maupun faktor

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[4] Rahayu, A.S. (2022), "Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya", Peneribit: Sinar Grafika, Hal: 1.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4.

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal (35) dan (36) agar disetiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana. Provinsi dan Kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulngan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan di tingkat nasional. Dalam upaya penanggulangan bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan menanggulangi bencana sesuai dengan peraturan yang ada.

Adapun fenomena banjir yang terjadi di Aceh Tamiang dari tahun 2020 sampai tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Bencana Banjir di Aceh Tamiang Tahun 2020-2023.

No.	Tahun	Frekuensi Banjir	Tanggal/Bulan	Pengungsi
1.	2023	10 s/d 150 cm	21 Januari	3.478 Jiwa
2.	2022	20 s/d 230 cm	6 November	107.981 Jiwa
		70 cm	22 November	47 Jiwa

3.	2021	20 s/d 150 cm	13 Januari	19.540 Jiwa
4.	2020	20 s/d 100 cm	17 Mei	152 Jiwa

Sumber Data: BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.

Pada bulan November 2022 lalu, situasi yang terjadi di Aceh Tamiang tergolong parah. Karena sudah 2 kali melanda wilayah tersebut, banjir selama bulan November kemarin hingga merendam 12 kecamatan di Aceh Tamiang. Tidak hanya pemukiman penduduk yang terendam, tetapi juga jalan-jalan utama seperti jalan nasional Banda Aceh-Medan yang tergenang air dan lumpuh selama beberapa hari akibat banjir tersebut. [6]

Akibat seringnya terjadi banjir di Aceh Tamiang, Tanggul di Aceh Tamiang masih sering jebol. Pada banjir yang melanda bulan November 2022 Kemarin, berbarengan dengan terjadinya kebocoran pada tanggul di Desa Gelung, Kecamatan Seruway. Kegagalan tanggul ini menyebabkan luapan air sungai yang merusak tanggul selebar 4–5-meter dan berdampak pada pemukiman warga, khususnya Desa Gelung, serta sekitar 128 rumah di daerah tersebut. Banjir menggenangi rumah-rumah warga dan jalan dengan kedalaman antara 20 hingga 60 cm, dan kondisinya bertahan selama lima hari. Upaya perbaikan tanggul di Desa Gelung selalu mengalami kegagalan karena sungai masih dalam keadaan banjir saat itu. Terlebih

[6]Agus Setyadi, *"Banjir Aceh Tamiang Diduga Akibat Alih Fungsi Hutan Jadi Kebun Sawit",https://www.detik.com/sumut/berita/d-6386025/banjir-aceh-tamiang-diduga-akibat-alih-fungsi-hutan-jadi kebunsawit-/amp,*diakses pada kamis, 03 November 2022, dikutip pada 14 januari 2023.

lagi pada umumnya mata pencaharian masyarakat bergantung pada sektor pertanian dan kebun. Ironisnya pada saat itu hampir dua tahun belakangan pada tahun 2021 sampai 2022 sawah dan ladang masyarakat selalu gagal akibat banjir yang mengakibatkan masyarakat setempat tidak pernah memetik panen di sawah dan ladang, akibatnya membuat roda perekonomian ditingkat pedesaan benar-benar terpuruk.

Selain itu, tanggul di sungai Desa Marlempang, yang berbatasan dengan Desa Balai, juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Tanggul yang jebol belum diperbaiki selama hampir dua tahun dari tahun 2021 sampai 2022, dan kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama banjir di Desa tersebut. Warga setempat kesal karena hingga saat ini tidak ada bukti konkret dari Pemda dan Pemprov Aceh untuk perbaikan tanggul tersebut. Warga setempat menyebutkan bahwa janji untuk perbaikanpun tidak pernah mereka dengar dari pemerintah. Mereka hanya melihat tanggul ini hanya dijadikan lokasi foto-foto oleh orang dinas dan pejabat pasca banjir. Bahkan sekelompok warga Desa Marlempang yang merasa putus asa dengan kondisi banjir ini, dari orang dewasa hingga anak-anak pergi ke lokasi tanggul sambil membawa poster yang betuliskan ungkapan rasa kecewa karena tanggul yang jebol tak kunjung diperbaiki. [7]

[7]Dede Harison, *"Tanggul Jebol Bertambah di Pesisir Aceh Tamiang"*,https://aceh.antaranews.com/berita/319738/tanggul-jebol-bertambah-di-pesisir-aceh-tamiang, diakses pada Rabu, 21 Desember 2022, dikutip pada 14 januari 2023.

Banjir ini terjadi karena faktor alam yang menjadi penyebab utama. Faktor alam ini terkait dengan kondisi Sungai Tamiang yang telah mengalami sedimentasi tinggi selama bertahun-tahun. Sungai Tamiang cenderung berair keruh dan mengandung lumpur, sehingga endapan lumpur ini telah terbentuk dari hulu hingga hilir sungai. Akibatnya, ketika terjadi curah hujan yang tinggi, volume air sungai meluap.[8]

Curah hujan yang sangat deras dan perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan aliran air sungai melebihi kapasitas normalnya. Ketika volume air yang masuk ke sungai melampaui kapasitas tebing sungai, maka terjadi banjir yang menyebabkan tanggul sungai jebol. Jenis tanah juga memainkan peran penting dalam hal ini karena menentukan respons terhadap curah hujan. Tanah dengan tekstur yang luas akan menyulitkan air hujan meresap ke dalam tanah, menyebabkan air mengalir ke sungai dengan lebih banyak.[9]

Kabupaten Aceh Tamiang juga merupakan wilayah dengan perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas area terluas. Seperti halnya di daerah lain, perkebunan kelapa sawit di sini juga menghadapi masalah ekologi yang sering dijumpai. Hal ini berkaitan dengan upaya menjaga kelapa sawit agar tetap berinteraksi secara stabil dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan adanya

[8]Wawancara dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda.

[9]Nugroho, dkk, *"Kajian Faktor Penyebab Banjir Dalam Perspektif Wilayah Sungai: Pembelajaran Dari Sub Sistem Drainase Sungai Beringin",* Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Vol.17, No.2, 2021, hlm. 122.

keberadaan kelapa sawit ini merusak keseimbangan ekosistem yang sudah ada.[10] Lebih dari 50% Area Penggunaan Lain (APL) di Aceh Tamiang diperuntukkan sebagai perkebunan kelapa sawit, yang menjadi komoditas utama sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Aceh Tamiang.[11]

Guna mengatasi dan menanggulangi permasalahan banjir di Aceh Tamiang, didirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang. BPBD memiliki peran penting dalam upaya mengurangi risiko terjadinya bencana di wilayah tersebut, terutama bencana banjir yang terjadi setiap tahun di Aceh Tamiang. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 76 Tahun 2016, Pasal: (4) ayat (1) menjelaskan bahwa *"BPBD adalah perangkat daerah sebagai unsur penunjang pelaksanaan pemerintah kabupaten Aceh Tamiang di bidang penanggulangan bencana daerah"*.[12]

Keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dan didorong agar tetap berkomitmen dalam berkontribusi menghadapi banjir di Aceh Tamiang. Salah satu contohnya adalah dengan mengikuti sosialisasi dan tidak membuang sampah sembarangan. Partisipasi adalah suatu proses yang memberikan kesempatan dan hak kepada masyarakat untuk

---

[10] World Agroforestry (ICRAF), *"Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Aceh Tamiang : Strategi dan Rencana Kegiatan Sustainable Farming In Tropical Asian Landscape (SFITAL)",https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publication/23164/,* dikutip pada tanggal 14 jan 2023.

[11] Majalah Sawit Indonesia, *"Aceh Tamiang ditargetkan Menjadi kabupaten Penghasil Sawit Berkelanjutan",https://sawitindonesia.com/aceh-tamiang-ditargetkan-menjadi-kabupaten-penghasil-sawit-berkelanjutan/,diakses* pada 14 september 2021, dikutip pada tanggal 14 jan 2023.

[12]Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 76 Tahun 2016.

ikut serta dalam mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penanggulangan banjir. Penangggulangan banjir juga hendaknya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah selaku penanggungjawab untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir juga menjadi tanggung jawab khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Meningkatkan kualitas suatu daerah adalah hal yang paling penting dalam kinerja pemerintah daerah. Satuan unit yang memiliki tugas khusus dalam bidang tertentu, seperti penanggulangan bencana, bertugas bekerja dengan disiplin, efisiensi, dan efektivitas. Pemerintah daerah dapat dikatakan telah berhasil apabila telah bekerja dan kinerjanya dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut dan apakah hak-hak masyarakat telah terpenuhi. Setiap individu berhak menerima perlindungan, baik dalam bentuk perlindungan sosial maupun rasa aman, terutama kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Pemerintah daerah juga harus memberikan perhatian yang lebih agar masyarakat mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.[13]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dalam penanganan bencana banjir, peran masyarakat menjadi elemen yang sangat penting. Karena, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menghadapi bencana banjir. Pemerintah Daerah memiliki peran dalam mengurangi kemungkinan terjadinya banjir melalui efektivitas kebijakan yang

[13]Rusna Rustam, *"Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Luwu Utara",* Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Muhammadiyah Makassar, hlm. 2.

diterapkan, dan masyarakat berpartisipasi dalam menjalankan kebijakan tersebut yang berasal dari pemerintah. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga penting. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus mempunyai kesadaran dalam menjaga lingkungan. Sehingga nantinya, Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menghasilkan output yang diinginkan.[14]

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul tentang "*Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir Di Aceh Tamiang"*.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang?
2. Bagaimana hubungan kerjasama Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang.
2. Untuk menganalisa pola hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[14]Novan Suryadi, *"Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda",* Jurnal llmu Pemerintahan, Volume 8, No 2, 2020, hlm. 429.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang bertujuan untuk memberikan penambahan wawasan keilmuan dan memperkaya literatur ilmiah yang ada dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti, yaitu Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir.

2. Manfaat Praktik

   Penelitian ini juga memiliki manfaat praktik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

   a. Masyarakat Aceh Tamiang dengan harapan dapat dijadikan sumber informasi mengenai pemahaman agar masyarakat Aceh Tamiang mendapatkan pengetahuan bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Risiko Banjir di Aceh Tamiang.

   b. Terkhusus bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini terkait hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana banjir.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros" tahun 2019, dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan perencanaan dan perumusan strategi dalam penanggulangan bencana banjir. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang membahas penanggulangan banjir. Selain itu, pemerintah Kabupaten Maros juga melaksanakan Program Kampung Iklim yang mengusahakan adaptasi dan mitigasi terhadap banjir. Implementasi strategi tersebut melibatkan pembangunan tanggul, bendungan, dan peningkatan jalan yang terletak di daerah rendah.[15]

[15]Dwi Nur Ilma Aulia, *"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros",* Skripsi, 2019, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menghadapi Bencana Banjir di Kabupaten Bondowoso" tahun 2022, dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Bondowoso, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam kesiapsiagaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Bondowoso berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya rencana tanggap darurat (TRC) dan Pusat Operasi Pusat Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS), perencanaan kontinjensi penanggulangan bencana banjir, pengumpulan data daerah rawan bencana dan lokasi evakuasi yang aman, serta persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan dalam penanggulangan bencana. Selain itu, BPBD juga melakukan sosialisasi, pelatihan keterampilan kebencanaan, dan membentuk desa tangguh bencana. Namun, kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bondowoso yang terencana juga menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, dan kurangnya sarana prasarana yang memadai.[16]

[16]Santi Dewi Setyowati, *"Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kabupaten Bondowoso",* Skripsi, 2022, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Jambi" tahun 2020, dilakukan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi risiko bencana banjir di Kota Jambi telah berjalan sesuai dengan visi dan misi BPBD. Pelaksanaan BPBD dalam setiap upaya penanggulangan berjalan dengan tepat dan efisien, memastikan penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan keadaan yang ada. Selain itu, BPBD juga telah menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi dan dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Jambi. BPBD Provinsi Jambi juga telah berhasil melaksanakan program pemetaan daerah rawan bencana, meskipun cakupannya mencakup seluruh provinsi Jambi. Dengan adanya peta daerah rawan bencana ini, masyarakat dapat mengetahui lokasi-lokasi yang rawan banjir dan bagaimana cara mengurangi risiko bencana jika terjadi banjir.[17]

Penelitian sebelumnya yang berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo" pada tahun 2015, dilakukan oleh

[17]Nahrul Fhadilla, *"Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Jambi",* 2020, Skripsi, Fakultas Syariah Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi risiko bencana banjir di Kecamatan Wara, Kota Palopo, serta hubungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir di Kecamatan Wara, Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam di Kota Palopo dinilai baik. Hal ini dapat dilihat dari penilaian masyarakat yang menjadi korban bencana banjir, yang merasakan manfaat dari program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kesiapsiagaan yang sangat intensif dilakukan dengan baik sebelum terjadi bencana banjir.Selain itu, hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menanggulangi risiko banjir juga dinilai sangat baik. Masyarakat aktif berpartisipasi dan terlibat dalam persiapan dan penanganan saat terjadi bencana. Kerjasama ini berjalan dengan baik, sehingga dapat membantu mengurangi dampak bencana banjir di Kecamatan Wara, Kota Palopo.[18]

Penelitian sebelumnya berjudul "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara" pada tahun 2022 dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam penanganan penanggulangan bencana pasca banjir di

[18] Abdul Latief, *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo",* Skripsi, 2015, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Kabupaten Luwu Utara, serta untuk memahami pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Luwu Utara setelah banjir tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan berbagai upaya rehabilitasi pasca banjir. Upaya tersebut mencakup pemberian bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang akibat banjir. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemulihan sosial dan psikologis bagi korban banjir. Di sisi lain, upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi pembangunan hunian tetap bagi korban banjir yang mengalami kerusakan berat pada rumahnya. Selain itu, dilakukan juga pembangunan jalan, jembatan, dan tanggul di daerah yang terdampak banjir. Selain itu, pembangunan drainase juga dilakukan di dua kecamatan yang terdampak banjir, yaitu Kecamatan Masamba dan Kecamatan Baebunta.[19]

2.2 Landasan Teori

Dengan adanya dasar teori, penelitian dapat diperkuat secara ilmiah untuk memastikan bahwa data dan hasil yang diperoleh tidak hanya bersifat spekulatif. Lebih lanjut, teori membantu peneliti dalam memberikan makna terhadap fenomena atau gejala sosial yang diamati. Teori digunakan sebagai acuan atau pembanding

[19]Dede Aldian Firdaus, *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara",* Skripsi, 2022, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

untuk informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Dengan kata lain, dalam penelitian kualitatif, teori memiliki peran krusial sebagai penopang, memungkinkan peneliti untuk menggali data secara komprehensif. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Thomas R. Dye, Menguraikan terdapat lima pilar utama dalam pembelajaran dan perkembangan ilmu kebijakan publik, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kelima pilar tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam kajian kebijakan publik, kelima pilar ini menjadi kunci jawaban atau solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Berikut adalah tahapan dalam proses kebijakan publik:

a. Penyusunan agenda: Tahap ini melibatkan identifikasi dan pemilihan isu-isu yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah atau pembuat kebijakan. Penyusunan agenda penting untuk menentukan prioritas masalah yang akan ditangani.
b. Formulasi kebijakan: Tahap ini mencakup proses perumusan kebijakan berdasarkan isu-isu yang telah diidentifikasi. Pada tahap ini, tujuan, strategi, dan alternatif kebijakan dipertimbangkan untuk mengatasi masalah yang ada.

c. Adopsi kebijakan: Tahap ini melibatkan proses pengambilan keputusan resmi oleh pemerintah atau lembaga legislatif untuk mengesahkan kebijakan yang telah diformulasikan. Keputusan ini mengubah kebijakan menjadi keputusan resmi yang diakui oleh pemerintah.

d. Implementasi kebijakan: Tahap ini melibatkan pelaksanaan kebijakan yang telah diadopsi. Proses implementasi melibatkan berbagai aktor dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

e. Evaluasi kebijakan: Tahap ini melibatkan penilaian terhadap dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi kebijakan penting untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan, dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.[20]

Jones, menekankan dalam Studi Kebijakan Publik ini pada 2 proses, yaitu:

a. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefenisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.

b. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap masalah-masalah, terhadap kebijakan Negara, dan memecahkannya.[21]

---

[20]Winarno, "Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus",Yogyakarta : Diterbitkan oleh CAPS (Center Of Academic Publishing Service), 2014, hlm. 35-37.

[21]Jones, C. O. (1977). Public Policy: Pengantar Kebijakan Publik. *Terj: Ricky Istamto. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Menurut George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi (1980), Menurut Edwars dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1980, Edwars III menyatakan bahwa proses implementasi sebagai:

"*...the state of policy making between the establishment of a policy (such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule) and the consequences of the policy for the peple whom it effect."* Menurut Edwards, Implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditumbulkan oleh kebijaksanaan *(output, outcome).*

Buku Edwards yang berjudul *"Implementing Public Policy"*, yang diterbitkan pada tahun 1980, menjadi referensi utama dalam kajian implementasi kebijakan di Indonesia, lebih banyak dikutip oleh para penulis dan praktisi implementasi dibandingkan dengan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Dalam model yang dikembangkan Edwards, terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Variabel-variabel ini telah diteliti melalui berbagai pendekatan.

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua buah pertanyaan, yaitu Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi berhasil? Dan hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal? Edwards berusaha menjawab dua buah pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik.

Faktor-faktor atau variabel-variabel itu adalah (a) komunikasi, (b) disposisi, (c) sumber daya, dan (d) birokrasi. Keempat dari faktor tersebut harus dilaksanakan secara stimulant karena antara variabel yang satu dengan variabel yang lain saling berkaitan dan saling berhubungan. Keseluruhan dari variabel tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasinya.

1. Komunikasi

   Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Salah satu kelemahan yang sering terjadi dalam kebijakan publik adalah kurangnya komunikasi yang efektif, baik saat formulasi maupun saat implementasi. Komunikasi seharusnya telah dibangun sejak tahap formulasi karena merupakan inti dari suatu kebijakan. Dengan komunikasi yang baik, kebutuhan dan tuntutan yang diperlukan dapat diidentifikasi. Pada tahap implementasi, dukungan dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

komitmen dari pihak-pihak terkait juga sangat penting dalam mengomunikasikan kebijakan publik.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III, dan terdiri dari:

a. Staf: berarti jumlah pekerja berdasarkan kemampuannya dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
b. Anggaran: Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan.
c. Sarana dan Prasarana/Fasilitas: Fasilitas fisik yang mendukung
d. keberhasilan implementasi, sesuai dengan kebutuhan kebijakan.
e. Kewenangan: Tingkat kewenangan implementator yang bervariasi tergantung pada jenis kebijakan yang akan dilaksanakan.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada komitmen para pelaksana terhadap kebijakan atau program yang mereka jalankan. Tingginya tingkat komitmen ini menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan kebijakan dengan baik.

4. Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang digunakan untuk mengelola pelaksanaan kebijakan. Edwards III menekankan pentingnya adanya tata aliran pekerjaan antara para pelaksana, terutama jika program melibatkan lebih dari satu lembaga atau institusi. Terkadang, fragmentasi tugas (penyebaran tanggung jawab pelaksanaan) diperlukan dalam implementasi kebijakan yang

kompleks dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.[22]

2.2.3 Teori Kewenangan

Wewenang berasal dari kata *"authority"* (Inggris) dan *"gezag"* (Belanda). Istilah wewenang sering sekali dikaitkan dengan istilah kekuasaan. Istilah kekuasaan berasal dari kata *"power"* (Inggris) dan *"macht"* (Belanda). Bagir Manan mempertegas istilah dari terminology apa yang dimaksudkan dalam wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Adapun, wewenang dalam hukum berarti sekaligus hak dan kewajiban yang harus dilakukan. [23]

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas *(legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur),* atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang undangan. Demikian juga pada setiap perbuatan kewenangan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang biasa. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau badan tata usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[22]Sahya Anggara, "Kebijakan Publik",Bandung : Diterbitkan oleh Pustaka Setia, 2014, hlm. 249-254.

[23] Ilmar Aminuddin. "Hukum Tata Pemerintahan". (Jakarta, Kencana: 2014). hal: 102-103.

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh.

Menurut H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt bahwa wewenang pemerintah diperoleh dengan tiga cara, yakni:

1. Atributif, Atributif adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan titik dalam pelaksanaan kewenangan atributif. Pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
2. Delegasi, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Kewenangan delegatif Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundangundangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang Diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.
3. Mandat, mandat adalah terjadi ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.[24]

2.2.4 Penanggulangan Bencana Banjir

Banjir adalah hasil dari akumulasi air yang berlebihan, disebabkan oleh limpahan air dari tanah yang jenuh dan sungai yang melebihi kapasitasnya. Kelebihan air ini tidak dapat ditampung, sehingga menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Meskipun banjir sebenarnya merupakan fenomena alam yang wajar karena air cenderung mengalir dan mencari titik terendah, namun jika terjadi secara berulang dan terus-menerus, banjir dapat menjadi ancaman bagi lingkungan dan masyarakat.[25]

Untuk mengatasi masalah banjir, diperlukan manajemen bencana yang bertujuan untuk mencegah kehilangan nyawa, mengurangi penderitaan manusia, memberikan informasi tentang risiko banjir kepada masyarakat dan pihak berwenang, serta mengurangi kerusakan infrastruktur, harta benda, dan kerugian ekonomi.

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya dan kegiatan yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana, yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan (rehabilitasi dan

---

[24] Sharon, G. (2021). Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, *3*(1), 50-63.

[25]Sri Nurhayati Qodriyatun, *"Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja",* Jurnal Masalah-Masalah Sosial Volume 11, No. 1 Juni 2020, hlm. 32.

rekonstruksi) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kegiatan penanggulangan bencana dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana.Tahapan penanggulangan bencana meliputi:

1. Tahap Prabencana:
    a. Pencegahan: Upaya untuk mengurangi ancaman bencana. Meliputi penyusunan rencana penanggulangan bencana yang mencakup semua tahapan dari sebelum bencana hingga pasca bencana.
    b. Mitigasi atau pengurangan: Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan menghadapi ancaman bencana alam.
2. Tahap Tanggap Darurat: Serangkaian upaya yang dilakukan setelah terjadi bencana banjir. Meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
3. Tahap Pasca Bencana:
    a. Pemulihan: Upaya untuk mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana melalui rehabilitasi sarana dan prasarana.
    b. Pembangunan Kembali: Program jangka panjang untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak, dengan mempertimbangkan

faktor risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, sistem pemerintahan, keamanan, dan ketahanan.

Dalam penanggulangan bencana, dilakukan berbagai kegiatan seperti pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi setelah terjadinya banjir.[26]

2.2.5 Peran Pemerintah Daerah

A. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Tujuan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana melalui pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencakup hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi individu dan wilayah yang rentan terhadap bencana di tingkat kabupaten.
2. Memastikan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak bencana alam.
3. Menyebarkan saran dan panduan praktik terbaik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[26]bphn.go,.id, "*AE UU NO 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana", https://bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%2024%20Tahun%202007%20Tentang%20Penanggulangan%20Bencana.pdf.,* diakses pada Agustus 2011, dikutip pada 1 Juni 2023.

4. Menjaga komunikasi dengan pejabat terkait dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan melalui pemberitahuan atau sistem peringatan massa dan kebakaran.
5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan pertolongan pertama yang sesuai.
6. Melaksanakan program pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
7. Mengidentifikasi rute evakuasi, lokasi aman, dan tempat pengungsian.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota bertindak sebagai penanggung jawab utama, sedangkan gubernur memberikan dukungan. Beberapa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana meliputi:

1. Mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana.
2. Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah.
3. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
4. Melaksanakan tindakan tanggap darurat.
5. Melakukan pemulihan pasca bencana.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah Kualitatif, secara kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami implikasinya. Oleh karena itu, penelitian kualitatif sering kali sangat memperhatikan proses, kejadian, dan intensitas. Dalam penelitian kualitatif nilai peneliti tersurat dalam situasi kasus-kasus yang terbatas dan melibatkan subjek yang relatif sedikit. Peneliti kualitatif sering terlibat dalam interaksi dengan realitas yang mereka pelajari. Pada saat yang sama, peneliti kualitatif memandang realitas sebagai hasil rekonstruksi pribadi atas partisipasi dalam situasi sosial. Peneliti kualitatif juga berinteraksi erat dengan realitas penelitiannya, baik itu secara teoritis maupun bahasa. [27]

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang, serta menganalisis pola hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang. Fokus penelitian ini adalah untuk

[27]Gumilar Rusliwa Somantri, *"Memahami Metode Kualitatif",* Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2, Desember 2005: 57-65, hlm. 58.

memahami bagaimana pemerintah daerah terlibat dalam mengatasi masalah banjir dan bagaimana interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai lokasi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat guna mendukung kesuksesan hasil penelitian.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, akan diperhatikan berbagai kejadian, tindakan, peristiwa, dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

   Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan melalui sumber-sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.[28] Dengan demikian, pengumpulan data ditentukan dengan meninjau literatur dan bahan pustaka yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yang dapat membantu untuk mendapatkan landasan teori untuk pertanyaan penelitian.

[28]Nursapia Harahap, *"Penelitian Kepustakaan",* Jurnal Iqra Volume 08 No.01 Mei 2014, hlm. 68.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian kualitatif di mana peneliti secara langsung terlibat dalam pengamatan dan partisipasi dalam studi sosial di tingkat mikro, melalui interaksi sosial atau kontak langsung dengan individu-individu dalam lingkungan tertentu. Peneliti melakukan percakapan individu dan mengamati secara langsung orang-orang yang menjadi subjek penelitian. Dalam metode penelitian lapangan ini, peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi lapangan dan menghasilkan temuan yang akurat dan jelas.[29]

3.5 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti memerlukan partisipasi informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah jenis informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Azwanil Fakhri, S.ST,	Kepala Bagian Protokol dan

[29]Fadlun Maros, dkk, 2016, *"Penelitian Lapangan (Field Research)",* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, hlm. 5.

	M.I.Kom	**Komunikasi Pimpinan Humas Setda Kabupaten Aceh Tamiang**
2.	**Drs. Bambang Supriyanto,MM**	**Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Aceh Tamiang**
3.	**Suci Faramudita Sari, M. Han**	**Analis Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Aceh Tamiang**

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara (Interview)

   Metode pengumpulan data yang pertama adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melalui wawancara, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan melalui interaksi langsung. Wawancara yang mendalam menjadi salah satu pendekatan utama dalam penelitian kualitatif. Wawancara kualitatif dilakukan secara formal dengan menggunakan pedoman wawancara yang

lebih fleksibel daripada pertanyaan terstruktur yang kaku. Tujuan utama wawancara adalah untuk mencatat dan mentranskripsikan data serta menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan percakapan.[30]

2. Observasi

Observasi kualitatif digunakan untuk mengamati kejadian alami dan mengikuti alur proses yang terjadi secara alami dalam kehidupan yang diamati. Observasi kualitatif semacam ini tidak terikat oleh pengukuran dan klasifikasi tanggapan yang terprediksi. Observasi kualitatif ini memiliki kebebasan untuk menggali konsep dan kategori-kategori dalam setiap peristiwa yang muncul, yang dianggap berasal dari subjek penelitian atau berdasarkan pengamatan peneliti.[31]

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap bagi metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan, keandalan temuan penelitian kualitatif dapat ditingkatkan jika digunakan atau melibatkan penelitian literatur yang relevan. Tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian kualitatif sebagian besar bergantung pada penggunaan dan pemanfaatan literatur yang tersedia.[32]

---

[30]Imam Nur Rachmawati, *"Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara",* Jurnal keperawatan Indonesia, Vol 11, No. 1, Maret 2007, hlm. 35-36.

[31]Hasyim Hasanah, *"Teknik-Teknik Observasi",* Jurnal at-taqaddum, Vol 8. No 1, Juli 2016, hlm. 23.

[32]Natalina Nilamsari, *"Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif",* Jurnal Wacana, Vol XIII, No. 2, Juni 2014, hlm. 178-179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kabupaten Aceh Tamiang

Tamiang dulunya adalah kerajaan yang sangat makmur, dipimpin oleh seorang Raja Muda Sedia yang memerintah dari tahun 1330-1366. Pada masa kerajaan, wilayah Tamiang terdiri dari beberapa wilayah, yaitu Sungai raya atau selat malaka dibagian utara, Besitang dibagian selatan, Selat malaka dibagian timur, dan Gunung Segama dibagian barat, yang terletak di Gunung Bendahara atau Wilhelmina Gebergte.

Permintaan pemekaran daerah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah diajukan dan diperjuangkan sejak tahun 1957, pada awal periode kedua Provinsi Aceh. Kemudian, dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS dalam Sidang Umum ke-IV tahun 1966, diusulkan untuk memberikan otonomi yang luas. Dalam usulan mengenai pelaksanaan Otonomi Riil dan luas dengan Nomor B-7/DPR-GR/66, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Istimewa Aceh menentang pemekaran daerah yang dianggap sudah siap untuk pengembangan penuh. Pada masa reformasi, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari masyarakat Aceh Tamiang, pada era reformasi sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mendapatkan kembali dukungan dan usulan dari:

1. Bupati Aceh Timur, dengan surat No. 2557/138 tanggal 23 Maret 2000, mengusulkan peningkatan status Pembantu Bupati Wilayah III Kualasimpang menjadi Kabupaten Aceh Tamiang kepada DPRD Kabupaten Aceh Timur.
2. DPRD Kabupaten Aceh Timur, dengan surat No. 1086/100 - A 2000 tanggal 9 Mei 2000, memberikan persetujuan terhadap peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Surat Bupati Aceh Timur, No. 12032/138 tanggal 4 Mei 2003, ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Aceh mengenai peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 138/9801 tanggal 8 Juni 2000, ditujukan kepada DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh mengenai peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Surat DPRD Daerah Istimewa Aceh No. 1378/8333 tanggal 20 Juli 2000, mengenai persetujuan peningkatan status Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Surat Gubernur Daerah Istimewa Aceh No. 135/1764 tanggal 29 Januari 2001, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Cq. Dirjen PUMD mengenai usulan peningkatan status Pembantu Bupati dan Kota Administrasi menjadi Daerah Otonom.

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh kerja keras, pada tanggal 2 Juli 2002, Tamiang resmi menjadi sebuah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[33]

4.1.1 Keadaan Geografis

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki luas wilayah sekitar 1.957,02 km2. Terdapat 12 kecamatan, 213 desa, dan 705 dusun di Kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan Tenggulun merupakan kecamatan dengan luas terbesar, mencakup sekitar 15,10% dari total wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Secara umum, wilayah ini didominasi oleh perkebunan dan persawahan. Ketinggian wilayah Kabupaten Aceh Tamiang bervariasi antara 20 hingga 700 kaki di atas permukaan laut. Kabupaten ini terletak di ujung timur Provinsi Aceh, berdekatan dengan perbatasan Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal batas-batas geografisnya, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki:

- Batas utara dengan Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Selat Malaka.

[33]Aceh Tamiang Pemkab, *"Sejarah Aceh Tamiang"*, *https://www.acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/sejarah-aceh-tamiang.html?fb_comment_id=1751711581582559_1815606605193056*, diakses pada 11 Mei 2018, dikutip pada 9 Mei 2023.

- Batas timur dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.
- Batas selatan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues.
- Batas barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Gayo Lues.[34]

Kabupaten Aceh Tamiang secara umum memiliki topografi yang terdiri dari dataran rendah dan perbukitan, yang sangat cocok untuk kegiatan perkebunan dan pertanian. Mayoritas penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan petani yang menggantungkan hidup mereka dari sektor pertanian. Di beberapa kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat tingkat risiko banjir yang tinggi. Beberapa kecamatan tersebut antara lain Tenggulun, Tamiang Hulu, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Sekerak, Karang Baru, Rantau, Bendahara, Banda Mulia, Manyak Payed, dan Seruway.[35]

4.1.2 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 294.356 jiwa. Rasio jenis kelamin terdiri dari 149.263 laki-laki (50,58%) dan 145.093 perempuan (49,42%). Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang, dengan rasio jenis kelamin sebesar 103, yang berarti setiap 100 perempuan diimbangi

[34]Profil PKP Kab. Aceh Tamiang, *https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tamiang/*, diakses pada 12 September 2022, dikutip pada 9 Mei 2023.

[35]Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

oleh 103 laki-laki. Kabupaten Aceh Tamiang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,52% dari tahun 2014 hingga 2020. Kecamatan Kota Kuala Simpang memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 4.209,38 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 72.352 KK pada tahun 2020. Penduduk usia produktif menyumbang sekitar 67,98% dari total penduduk.[36]

4.2 Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tamiang

4.2.1 Visi dan Misi BPBD Aceh Tamiang

Visi dari BPBD Aceh Tamiang adalah "Masyarakat Aceh Tamiang yang memiliki kemampuan kuat dalam menghadapi bencana". Misi BPBD Aceh Tamiang meliputi:

1. Mencapai pembangunan yang aman dari bencana.
2. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Memperkuat kinerja aparatur dan institusi penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan penanggulangan bencana yang berkualitas.

4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Aceh Tamiang

1. Sekretaris Daerah: Drs. Asra
2. Kepala Pelaksana: Iman Suhery, S.stp.msp

[36]Profil PKP Kab. Aceh Tamiang.

3. Kepala Sekretariat: Syahrial, S.sos.I
4. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Pemadam Kebakaran: Juli Darma Bakti, Spd
    - Analis kebencanaan muda yang ahli di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Pemadam Kebakaran.
    - Analis kebakaran muda yang ahli di bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Pemadam Kebakaran.
5. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik: Drs. Bambang Supriyanto, MM
    - Analis kebijakan muda yang ahli di bidang Kedaruratan dan Logistik.
6. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Fachruddin, S.sos.I
    - Analis kebijakan muda yang ahli di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

4.3 Upaya Pemerintah Daerah dalam mengurangi resiko banjir

Peneliti menggunakan teori dari George Charles Edwards III: Pendekatan Masalah Implementasi (1980), mengenai implementasi kebijakan yang terdiri dari empat variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Birokrasi.

1. Komunikasi

Edwards menjelaskan bahwa komunikasi memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Kesuksesan implementasi sebuah program tergantung pada pemahaman yang jelas oleh para pelaksana. Hal ini melibatkan proses penyampaian

informasi yang baik dan kejelasan dalam instruksi yang diberikan. Syarat utama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa para pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, komunikasi yang akurat dan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana.[37]

Segala rincian mengenai aspek komunikasi dan bentuknya adalah sesuatu kegiatan yang sangat penting bagi upaya membangun pemahaman, kesadaran dan kemudian kepatuhan dalam memenuhi atau melaksanakan kewajiban publik. Diantara kewajiban publik itu adalah kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mengatasi bagaimana menanggulangi bencana banjir yang ada di Aceh Tamiang. Oleh karena itu, ketentuan yang telah ditetapkan perlu dikomunikasikan. Dalam implementasi kegiatan pengurangan resiko banjir ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan juga masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Humas Setda, beliau menyatakan bahwa:

> *"Pemerintah Daerah mengajukan proposal untuk membangun tanggul di sungai Aceh Tamiang ke BNPB. Selain pembangunan Tanggul, Pemerintah Daerah menyampaikan lanjutan proposal mengenai pembangunan bendungan di sungai Aceh Tamiang ke kantor staff ke presidenan. Jika bendungan itu sudah ada, maka resiko banjir akan dapat dikurangi. Pemda juga mengusulkan agar sungai Aceh Tamiang dikeruk sehingga lebih dalam lagi, tetapi karena sungai Tamiang ini ranahnya Provinsi Aceh jadi pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengerukan itu".*[38]

---

[37]Agus Subianto, "Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi)", Surabaya : Diterbitkan oleh Brilliant, 2020, hlm. 70.

[38]Wawancara dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Humas Setda Pada Senin, 3 Juli 2023.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya hubungan komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah tidak mengambil keputusan secara sepihak, terutama karena Sungai Tamiang termasuk dalam wilayah Provinsi Aceh dan memiliki pengelolaan yang menjadi tanggung jawab kementerian dan Pemerintah Provinsi. Kabupaten hanya dapat mendorong, mengusulkan, dan melakukan tindakan-tindakan minimal terkait hal tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan informan yang terkait, yaitu Analisis Mitigasi Bencana, beliau menyatakan:

> *"Sinegritas antara Pemprov Aceh dengan Pemkab Aceh Tamiang dalam menanggulangi bencana banjir, itu respon mereka cepat. Begitu banjir BPBD langsung telfon ke BPBA. karna kan berjenjang, kita melaporkan ke BPBA dulu baru ke BNPB. Kepala BPBA besok paginya langsung datang ke Aceh Tamiang. Jadi kalau Pemkab ke Pemprov itu sinegritasnya cukup kuat".*[39]

Pernyataan tersebut mencerminkan tanggung jawab yang sangat penting yang diemban oleh Pemerintah Provinsi terhadap masyarakat Aceh Tamiang. Dalam upaya komunikasi yang efektif, terdapat sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pesan dan informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Salah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan adalah sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD kepada masyarakat. Namun, hasil dari kegiatan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan tingkat kepatuhan. Misalnya, masih terdapat masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya, sehingga menyebabkan penumpukan sampah di Daerah Aliran Sungai (DAS).

[39]Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana Pada Selasa, 2 Mei 2023.

Maka dari itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang memiliki Program dalam Penanggulangan Bencana, yaitu Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota. Seperti:

a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

Program ini mencakup kegiatan seperti Sosialisasi, BPBD Aceh Tamiang secara rutin setiap tahunnya mengadakan kegiatan sosialisasi untuk memberikan wawasan kepada masyarakat guna mengurangi risiko bencana. BPBD Aceh Tamiang pernah menggelar sosialisasi dan Workshop Mitigasi Bencana sebagai respons terhadap indeks ketahanan daerah yang rendah (IKD-0,30) menurut studi risiko bencana Aceh 2021-2023.

Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan dan memahamkan masyarakat tentang langkah-langkah antisipasi, mitigasi, dan penanggulangan bencana secara terpadu, yang mencakup komponen risiko bencana, seperti ancaman yang ada dan kerentanan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tamiang. Program Informasi dan Edukasi ini melalui sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana. Dalam sosialisaniya, BPBD juga mendirikan Desa Tangguh Bencana, yang bertujuan agar seluruh masyarakat Aceh Tamiang memiliki kemandirian yang tangguh untuk beradaptasi dan siap menghadapi berbagai ancaman bencana, baik dalam skala besar maupun kecil.

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan desa yang memiliki kemampuan mandiri dalam beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana.

Kemampuan mandiri tersebut diperoleh melalui pemberdayaan dan mobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, program ini juga melibatkan evaluasi dan pemantauan kapasitas yang dimiliki oleh desa.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan seorang anggota BPBD yang bertanggung jawab dalam analisis mitigasi bencana. Menurut beliau:

> *"BPBD sering melakukan adanya sosialisasi. Bahkan BPBD aceh tamiang setiap tahun menganggarkan untuk melakukan sosialisasi kebencanaan. kalau ke masyarakat itu kita membuat Desa tangguh, Relawan tangguh, dan pemuda peduli bencana. Kalau untuk undangan-undangan dari instansi ada juga. Seperti kejaksaan negeri yang paling rutin untuk mengundang BPBD untuk sosialisasi tentang kebencaaan. Bahkan untuk saat ini yang lagi rutin-rutinnya mengajak untuk sosialisasi bencana itu anak Tk. Tk di Aceh Tamiang bahkan lagi aktif-aktifnya belajar tentang Bencana".*[40]

Menurut hasil wawancara, BPBD secara rutin diundang dan mengunjungi berbagai instansi dan sekolah untuk memberikan edukasi kepada para pelajar. Kegiatan ini dikenal sebagai *"BPBD Go to School"* yang dilakukan melalui seminar tentang tanggap darurat dalam menghadapi bencana. Program ini merupakan salah satu program utama yang harus dilakukan secara berkala.

2. Sumber Daya

Menurut Edward, Sumber daya melibatkan empat elemen yang terdiri dari jumlah dan kualitas staf yang memadai, anggaran/dana yang memadai, sarana

[40]Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana Pada Selasa, 2 Mei 2023.

prasarana seperti fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan, dan kewenangan atau otoritas yang memadai.[41] Sumber daya memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Tidak peduli seberapa baik kebijakan itu dirancang, jika sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya terbatas, maka pencapaian tujuan akan terhambat.

Pengurangan risiko banjir memerlukan berbagai sumber daya, seperti sumber daya manusia yang terampil, sumber daya anggaran yang mencukupi, sarana dan prasarana yang memadai, serta kewenangan yang memadai. Keempat sumber daya ini saling melengkapi satu sama lain. Keterbatasan di salah satu aspek sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan, sehingga hasil yang diharapkan tidak dapat dicapai.

Dalam hal mengurangi risiko banjir, yang dibutuhkan sangatlah kompleks atau beragam dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada, pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada. Seperti, dalam hal:

a. Sumber Daya Manusia (staff)

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dan penting dalam implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya

[41]Agus Subianto, "Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi)", Surabaya : Diterbitkan oleh Brilliant, 2020, hlm. 71.

manusia juga perlu dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu organisasi, tujuan organisasi apa pun dibentuk untuk kepentingan manusia, dan pelaksanaan misi organisasi dijalankan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia menjadi faktor strategis dalam semua kegiatan institusi atau organisasi.[42]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan analis mitigasi bencana, beliau menyatakan:

> *"Sampai hari ini, SDM dan personil BPBD masih belum memadai. Jabatan fungsional untuk setiap bidang di BPBD belum terpenuhi. Tenaga ahli juga belum memadai".*[43]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang menghadapi keterbatasan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) atau staf yang dimiliki.

b. Sumber Daya Anggaran (dana)

Anggaran memiliki nilai yang sangat penting dalam proses penentuan, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Anggaran berperan dalam mengambil tindakan nyata dalam konteks keuangan, yang berkontribusi dalam meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Peran anggaran semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah yang dihadapi.

---

[42]Larasati, S, "Manajemen Sumber Daya Manusia", Penerbit Deepublish, 2018, hlm. 1-5.
[43]Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana Pada Selasa, 2 Mei 2023.

Dalam penyusunan anggaran, penting untuk menjalankan keuangan dengan efisiensi. Dengan menyusun program-program secara sistematis, efisiensi dapat tercapai. Perencanaan, di sisi lain, merupakan proses melihat ke depan untuk menentukan tindakan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan dimulai, dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran tertentu.[44]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu dengan Analisis Mitigasi Bencana BPBD Aceh Tamiang, Beliau mengatakan:

> *"Jadi sebenarnya untuk bencana banjir, BPBD memakai anggaran APBD. Misalnya terjadi bencana banjir besar seperti kemarin dibulan November 2022. Itukan terjadi bencana besar, daerah tidak mampu karena 12 Kecamatan sekabupaten semuanya terdampak. ketika Daerah sudah tidak mampu lagi menanggulanginya. BPBD melaporkan ke BNPB mengeluarkan status tanggap darurat. Ketika sudah keluar status tanggap darurat nanti untuk anggaran kebencanaan tadi kita pakai DSP (Dana Siap Pakai), dana ini dari BNPB. Kalau untuk anggaran kebencanaannya, dana APBD itu dana kegiatan rutin. Kalau misalnya terjadi bencana besar, BPBD belum bisa untuk menanggulanginya karena tidak cukup anggarannya. Ada syarat juga untuk dana DSP, seperti melihat sebesar apa bencananya, berapa banyak yang terdampak, kalau sudah tercukupi persyaratan tadi maka akan mendapatkan dana DSP".* [45]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan, yaitu analis mitigasi bencana BPBD Aceh Tamiang, Beliau mengatakan:

> *"Terkait anggaran yang disediakan untuk rekontruksi pasca bencana banjir dan bagaimana pengelolaannya dilihat dari skala bencananya terlebih dahulu. Skalanya besar atau tidak. Contohnya, banjir November kemarin. itukan banjirnya skala besar. Kemudian ditambah lagi dengan adanya tanggul yang jebol, dan itu tidak tidak hanya 1 melainkan 3, dan tidak cukup*

[44]Adnyana,I.M, "Penganggaran Perusahaan",Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS),2020, hlm. 1.

[45]Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana Suci Faramudita Sari, M.Han Pada hari dan tanggal : Selasa, 2 Mei 2023.

jika menggunakan anggaran BPBD saja. Maka dari itu, Kita memakai dana dai BNPB. Kita mengajukan dana DSP untuk penanggulangan banjir untuk pembuatan tanggul". [46]

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan informan, ditemukan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak memadai untuk melakukan penanganan bencana banjir.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana (fasilitas)

Sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi dan mempermudah manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana berperan sebagai alat yang langsung terkait dan menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan aktivitas untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, prasarana merupakan faktor yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.[47] Sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang dalam program kerjanya, yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, mencakup beberapa kegiatan:

1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota.
2. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota, seperti:

[46]Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana Suci Faramudita Sari, M.Han Pada hari dan tanggal : Selasa, 2 Mei 2023.

[47]Istihora, S. K., & Basri, A. H, "Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat Kesiapsiagaan Banjir", Gresik : Diterbitkan oleh CV. Jakad Media Pusblishing, 2020, hlm. 5.

- Pelaksanaan pusat pengendalian dan operasi penanggulangan bencana (Pusdalops PB).
- Pengadaan alat berat (Ponton) yang digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana.
- Dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota.

Pada bulan Januari 2023, dua alat eskavator dikerahkan untuk memperbaiki tanggul yang jebol di Aceh Tamiang akibat banjir. Pengiriman alat berat tersebut bahkan dikawal oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik Aceh Tamiang, Bambang Supriyanto, untuk mendampingi mobilisasi alat berat yang akan digunakan dalam perbaikan tanggul yang rusak. Dua unit eskavator ini merupakan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan baru diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang seminggu yang lalu. Penduduk Desa Gelung, Zul Azwarsyah, menyatakan bahwa eskavator yang dibawa oleh BPBD Aceh Tamiang telah bekerja dengan baik dalam merehabilitasi badan tanggul sungai yang mengalami kerusakan.[48]

Pada saat Pasca Banjir, BPBD juga melakukan kegiatan yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Kederaruratan dan Logistik, Beliau mengatakan:

[48]Nur Ichsan Yuniarto, *"Perbaiki Tanggul Jebol, BPBD Aceh Tamiang Kerahkan 2 Alat Berat"*,https://aceh.inews.id/amp/berita/perbaiki-tanggul-jebol-bpbd-aceh-tamiang-kerahkan-2-alat-berat/akk, diakses pada 23 Januari 2023, dikutip pada 30 Juni 2023.

> *"Pada Pasca banjir BPBD membuat beberapa kegiatan yaitu dengan Pemulihan kembali sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pendidikan seperti pembersihan gedung kantor dan gedung sekolah, setelah itu kita melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian oleh Bidang Rehablitisasi dan Rekontruksi, setelah itu pengusulan perbaikan tanggul pasca banjir, dan juga penanaman rumput Vetiver di seputaran tanggul".* [49]

d. Sumber Daya Kewenangan.

Kewenangan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Di dalam lembaga pemerintahan, adanya batasan atau kekurangan dalam wewenang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dengan efektif. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan menggunakan wewenang yang ada dan memahami wewenang untuk program-program yang sangat penting, terutama jika kebijakan-kebijakan tersebut bersifat baru atau melibatkan persoalan teknis.[50]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda, beliau mengatakan:

> *"Kewenangan banjir sebenarnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir jika terjadi di Aceh Tamiang. Dengan melalui pendanaan, Pemda dibantu oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Apalagi sungai Tamiang ini ranahnya Provinsi karena ada beberapa sungai besar di Aceh termasuk sungai Tamiang dan yang mengelola itu adalah Kementerian dan Provinsi Aceh, Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengelola. Jadi Pemda hanya mendorong, mengusulkan dan melakukan tindakan-tindakan minimal".* [51]

---

[49] Wawancara dengan Kepala Bidang Rekontruksi dan Logistik Pada Senin, 3 Juli 2023.

[50] Agus Subianto, "Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi)", Surabaya : Diterbitkan oleh Brilliant, 2020, hlm. 233-235.

[51] Wawancara dengan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Pada Senin, 3 Juli 2023.

Berdasarkan pernyataan tersebut, tindakan minimal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti melakukan penanaman vetiver semacam tanaman penyangga dan juga bambu.

3. Disposisi

Menurut Edward**,** Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana (implementator) terhadap kebijakan.[52] Disposisi merujuk pada sikap atau keinginan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Keinginan tersebut menentukan sejauh mana keseriusan dan ketulusan mereka dalam menjalankan tugas. Sikap para pelaksana merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan kerja dan motivasi para pegawai atau pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, tidak hanya diperlukan pegawai yang memiliki keterampilan, tetapi juga dibutuhkan pegawai yang memiliki motivasi yang kuat dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Meskipun disposisi bersumber dari dalam diri para pelaksana kebijakan, hal tersebut tidak berarti bahwa kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan serta tingkat urgensi masalah yang harus diatasi oleh kebijakan tersebut.

[52]Agus Subianto, "Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi)", Surabaya : Diterbitkan oleh Brilliant, 2020, hlm. 71.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa komitmen Pemerintah Daerah akan penanggulangan bencana banjir sudah cukup baik. Dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam hal mengurangi resiko bencana banjir, Pemerintah Daerah melakukan kebijakan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Humas Setda, beliau mengatakan:

> *"Pada saat Prabencana, pemerintah menyiapkan beberapa strategi, ada pembentukan kader-kader siaga bencana disetiap kampung untuk melaporkan jika kebencaan terjadi. yang kedua, Pemerintah Daerah sudah melakukan penanaman Vetifer semacam tanaman penyangga dan juga bambu. Selanjutnya, membuat edukasi seperti jangan membuang sampah sembarangan ke sungai guna mengurangi potensi banjir. Pada saat terjadinya bencana, Pemerintah membentuk 3 sektor Satgas bencana ada yaitu BPBD untuk penanganan kebencanaannya, Dinas Sosial untuk penanganan pengungsi saat bencana, dan Dinas Lingkungan Hidup, 3 Dinas ini dibawah komando Sekretaris Daerah. Pada saat Pasca Bencana, Peran dari BPBD dan dinas lingkungan hidup yang paling terdepan tugasnya terkait dengan pembersihan area yang terkena bencana banjir".*[53]

Pemerintah Daerah Aceh Tamiang juga memiliki lumbung sosial untuk menyimpan stok-stok kebutuhan yang digunakan pada saat-saat darurat bencana. Jika terjadi bencana banjir di Aceh Tamiang Pemerintah Daerah tidak kelabakan untuk melakukan penyaluran bantuan. Pemerintah Daerah sudah memiliki lumbung sosial yang berada di 4 titik kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Karang Baru, Kecamatan Bendahara, dan Kecamatan Seruway, yang ada di Aceh Tamiang. Lumbung sosial ini berupa bahan – bahan yang bisa disimpan lama.

[53]Wawancara dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Hubungan Masyarakat Setda pada Seni, 3 Juli 2023

Seperti, sandang, genset sebanyak sebanyak 8 unit dan tendon air sebanyak 8 unit. Setiap kecamatan diberikan 1 unit genset dan 2 unit tandon air. Semuanya akan digunakan dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana banjir.

Dalam upaya mengurangi risiko banjir, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membangun tanggul. Ada empat tanggul yang dibangun di Marlempang Kecamatan Bendahara, Rantau Pakam Kecamatan Bendahara, Teluk Halban Kecamatan Bendahara, dan Gelung Kecamatan Seruway. Pembangunan tanggul ini bertujuan untuk meminimalisir risiko banjir yang terjadi setiap tahun. Berikut ini adalah kutipan wawancara yang dilakukan dengan informan Analisis Mitigasi Bencana, Beliau mengatakan:

> *"Permasalahan banjir yang terjadi ini menjadi suatu tugas kita untuk maintenance fisiknya. Fisik dari Aceh tamiang itu sendiri, seperti pembangunan Tanggul, kemudian dilihat dari hulunya, sudah aman belum di hulunya sana. Dalam pembangunan Tanggul juga tidak serta merta berdiri dengan secara sempurna, seperti pada tahun 2022 kemarin, Tanggul jebol di Desa Gelung, Kec. Seruway. Akibatnyapun dari kejadian itu luapan arusnya berimbas ke pemukiman warga satu kampung".*[54]

Ketika terjadi kerusakan pada tanggul, seperti yang terjadi pada bulan November 2022, Pemerintah Daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat bekerja sama untuk memperbaiki tanggul tersebut. Kerusakan tanggul ini memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat setempat. Selain menyebabkan banjir di permukiman, juga merusak lahan pertanian

[54]Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana Suci Faramudita Sari, M.Han Pada hari dan tanggal : Selasa, 2 Mei 2023.

masyarakat. Dampak kerusakan tanggul ini juga berimbas pada beberapa desa lainnya. Secara umum, mata pencaharian masyarakat Aceh Tamiang sangat bergantung pada sektor pertanian dan kebun.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membangun tanggul sungai yang jebol di wilayah hilir Kabupaten Aceh Tamiang sebagai langkah antisipasi terhadap banjir di daerah tersebut. Kepala BNPB Pusat mengunjungi wilayah tersebut untuk meninjau banjir yang sempat melumpuhkan jalur transportasi dari Aceh hingga Sumatra Utara selama berhari-hari. Pembahasan mengenai tanggul sangat penting dilakukan karena Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah yang rentan terhadap bencana banjir setiap tahunnya.

Pada tanggal 7 Mei 2023, Datok Penghulu Kampung Rantau Pakam, Bapak Ruslan, yang diwawancarai oleh Theacehpost.com, menyatakan bahwa pembangunan tanggul ini telah lama dinantikan oleh masyarakat sebagai upaya untuk meminimalisir banjir yang hampir setiap tahun terjadi dan berdampak pada pelemahan ekonomi akibat kerusakan lahan pertanian. Namun, kini masyarakat dapat merasa lega karena Pemerintah telah merealisasikan pembangunan tanggul penahan tebing sungai di kampung Rantau Pakam, Kecamatan Bendahara, dengan anggaran sebesar Rp. 5,8 miliar yang berasal dari dana otonomi khusus (otsus) tahun 2023.

Tanggul tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan banjir di Aceh Tamiang, khususnya di Kecamatan Bendahara, serta

membantu memulihkan mata pencaharian utama masyarakat di beberapa kampung di Kecamatan Bendahara.[55]

4. Birokrasi

Edward berpendapat bahwa birokrasi merupakan salah satu entitas yang sering, bahkan secara keseluruhan, bertindak sebagai pelaksana kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu aspek struktural yang sangat fundamental dalam suatu organisasi. Mereka tidak hanya terdapat dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam organisasi atau lembaga lain yang dibentuk untuk melaksanakan kebijakan.[56]

Organisasi dibentuk dan dijalankan dengan tujuan mencapai berbagai target yang telah ditetapkan, serta untuk mempertahankan dan memperluas aktivitas organisasi dalam merespons perubahan lingkungan. Strategi organisasi merupakan tindakan yang berkaitan dengan pendekatan rasional yang dikembangkan oleh para pemikir perspektif modern, dan strategi tidak selalu harus berupa perencanaan yang sistematis dan terperinci. Implementasi kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang adalah dengan membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, yaitu Badan Penanggulangan

---

[55]Admin Pengairan Aceh, *"Warga Pesisisr Aceh Tamiang Gembira Dibangunnya Tanggul Sungai"*,https://pengairan.acehprov.go.id/berita/kategori/berita-kegiatan/warga-pesisir-aceh-tamiang-gembira-dibangunnya-tanggul-sungai, Diakses pada Jum'at, 19 Mei 2023, Dikutip pada 27 Juni 2023.

[56]Dr. Sahya Anggara, M.Si, "Kebijakan publik",Bandung : Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2018, hlm. 254.

Bencana Daerah (BPBD). BPBD dirancang untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara menyeluruh, menggantikan pendekatan konvensional yang hanya bersifat tanggap darurat. Pendekatan baru ini memberikan penekanan yang merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik mengenai Peran BPBD dalam mengurangi resiko banjir, beliau mengatakan:

> *"Sesuai dengan SOP nya, Peran BPBD dalam mengatasi dampak banjir adalah dengan ditinjau dulu bagaimana dampak banjir yang terjadi, ketika banjir BPBD bertugas untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena dampak banjir, tidak hanya itu dampaknya pun diperhitungkan, terutama proses bembersihan jalan-jalan yang banyak lumpur yang diakibatkan banjir. BPBD juga berperan dalam pembuatan tanggul, sosialisasi, pembuatan grup-grup kebencanaan tentang relawan-relawan banjir. Grup kebencaan ini seperti merekrut orang-orang diluar dari kantor BPBD seperti orang-orang desa untuk mengerti tentang bagaimana sikap kalau terjadi bencana banjir".*[57]

Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 Pasal 20, dijelaskan bahwa badan penanggulangan bencana daerah memiliki fungsi: 1) merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien; 2) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.[58]

---

[57] Wawancara dengan Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik pada Senin, 3 Juli 2023.
[58]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (Pasal 20).

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tantang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika merujuk pada Qanun Nomor 7 Tahun 2010 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 20), dan peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi pemangku jabatan struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.[59]

Sebelum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang dibentuk, pemerintah membentuk suatu lembaga khusus yang bertugas menangani bencana dan pengungsi. Lembaga tersebut bernama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP). Meskipun Bakornas PBP diberi wewenang untuk menangani bencana dan pengungsi, namun lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan atau menggerakkan departemen terkait sumber daya manusia dan dana ketika keadaan darurat sedang berlangsung. Di tingkat nasional hingga kabupaten, terdapat badan penanggulangan bencana dalam bentuk satuan pelaksana (satlak), yang bertugas untuk mengkoordinasikan bantuan dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk pihak luar negeri.

[59]Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010, *Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang*.

Kemudian dalam mengatasi masalah yang tindak diinginkan, maka dari itu diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan badan setingkat departemen yang bertanggung jawab secara resmi kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini menggantikan Bakornas PB yang selama ini ada dalam lingkungan dan turut membantu masyarakat. Selain di pusat, di daerah pun dibentuk unit pelaksana daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersifat operasional.

4.4 Hubungan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Mengurangi Resiko Banjir

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat di Aceh Tamiang telah terjalin dengan baik dan bersinergitas. Untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan di masa yang akan datang. Salah satu langkah penting tersebut adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 13 Tahun 2009 dan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Aceh Tamiang melalui surat No. 061/3692 tanggal 20 Oktober 2009 tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang. Keputusan ini kemudian ditetapkan pada bulan Januari 2010.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik, beliau mengatakan:

> *"Kerjasama yang dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti kepala desanya bersama dengan warganya untuk membuat saluran-saluran resapan air. Dan BPBD juga selalu bekerjasama dengan kepala desa dan camat untuk menanggulangi banjir, BPBD akan menyampaikan pada tokoh-tokoh masyarakat tentang banjir yang diakibatkan dari luapan. maka dari itu, masyarakat harus membuat resapan-resapan disekitar desanya. Seperti di Rantau Pakam, masyarakat menyediakan lahan, BPBD yang membuat tanggul agar air-air nya tidak langsung mengalir masuk ke persawahan masyarakat. Itu semua dari 800 M dibuat oleh BPBD, BPBD yang membuat tanggul dengan meminjamkan alat – alat berat untuk masyarakat, minyak, dan juga supir".*[60]

Pemerintah Daerah juga mengadakan berbagai pelatihan terkait manajemen bencana, koordinasi bencana antar lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi anggota Tim Tanggap Bencana (TAGANA), serta pelatihan antisipasi bencana alam bagi masyarakat desa yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Aceh Tamiang. Pelatihan-pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan merupakan bagian penting dari upaya persiapan yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas dalam menangani bencana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Analisis Mitigasi Bencana, Beliau mengatakan:

> *"Pihak BPBD juga mempunyai hubungan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. BPBD ada bekerjasama dengan PMI, SAR, BASARNAS, TAGANA. Ada juga LSM luar negeri yang berfokus meminta data anak-anak korban bencana".* [61]

[60]Wawancara dengan Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik pada Senin, 3 Juli 2023.
[61]Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana Pada Selasa, 2 Mei 2023.

Sebagai langkah dalam mengurangi risiko banjir, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah membentuk tim Tanggap Bencana (TAGANA) di Dinas Sosial, tim penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana di Dinas Kesehatan, serta melaksanakan program reboisasi hutan yang telah ditebang dan penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran sungai. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan anggaran berkaitan dengan kontribusi mereka sebagai penyumbang pendapatan terbesar dalam APBD melalui pembayaran pajak yang merupakan kewajiban kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan Analisis Mitigasi Bencana, Beliau mengatakan:

> *"Masyarakat Aceh Tamiang sudah sangat tangguh istilahnya dengan bencana banjir mereka sudah bersahabat jadi local wisdomnya sudah kuat. Kebanyakan masyarakat sendiri mereka sudah tahu kalau hujan di hulu pasti potensi banjir besar. biasanya orang-orang di hilir mereka sudah was-was. 2 hari atau 3 hari setelah hujan pasti mereka sudah evakuasi duluan".* [62]

Misalnya, di Desa Teluk Halban, mereka telah mengembangkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman bencana, sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam mitigasi bencana.[63]

---

[62]Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana Pada Selasa, 2 Mei 2023.

[63]Munawarah R, & Maulidian, M.O.R, 2022, *"Mitigasi Bencana Banjir di Desa Teluk Halban Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang",* Jurnal Pendidikan Geosfer, 7 (1).hlm. 92-92.

Masyarakat di Desa Teluk Halban, Kecamatan Bendahara, telah aktif melakukan tindakan mitigasi bencana banjir. Mereka secara sukarela membersihkan saluran air dan parit di sekitar rumah dan lingkungan mereka melalui kerja sama gotong royong. Selain itu, mereka juga telah mengetahui jalur evakuasi terdekat untuk menghindari bahaya saat terjadi banjir. Masyarakat ini juga bijak dalam mematikan aliran listrik selama banjir untuk menghindari risiko yang lebih tinggi. Mereka juga sadar akan pentingnya menyelamatkan barang dan dokumen penting serta mencari tempat yang lebih tinggi untuk berlindung ketika banjir melanda. Mereka secara aktif mengikuti perkembangan informasi melalui media dan jika terjadi banjir, mereka langsung menuju lokasi pengungsian terdekat. Setelah banjir berlalu, mereka juga melakukan pembersihan rumah dan halaman agar dapat dihuni kembali dengan aman.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik, beliau mengatakan:

> *"Dalam melakukan Tanggap Darurat, seperti evakuasi penyelamatan orang-orang yang terkena banjir. Tim penyelamatan BPBD terkadang bekerjasama dengan Tim SAR yang dibentuk oleh Basarnas. BPBD bersama lembaga lain juga ada membuat Desa Tangguh dan Relawan Tangguh".*[64]

Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga melibatkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun kembali daerah yang terdampak banjir, sementara masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan.

[64] Wawancara dengan Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik pada Senin, 3 Juli 2023.

Sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat diwujudkan melalui pendirian Desa Tangguh dan Relawan Tangguh. Desa Tangguh Bencana (Destana) merujuk pada desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk menghadapi ancaman bencana dan memulihkan diri dari dampak bencana dengan cepat. Desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori Destana telah menerima pelatihan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menganalisis ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya masyarakat guna mengurangi risiko bencana.[65]

Pada bulan September 2022, BPBD Aceh Tamiang menyelenggarakan pelatihan dalam upaya mitigasi bencana menuju Destana. Idealnya, pemerintah daerah dan masyarakat harus memiliki pemahaman dan kesadaran tentang langkah-langkah antisipasi dan penanggulangan bencana secara menyeluruh yang mencakup aspek ancaman, kerentanan, dan kapasitas di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui upaya mitigasi bencana menuju Desa Tangguh Bencana, diharapkan seluruh komponen masyarakat memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan merespons ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Desa Tangguh Bencana merupakan desa yang memiliki kemampuan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana. Kemampuan mandiri ini dicapai dengan upaya yang dilakukan secara independen, dengan memberdayakan dan menggerakkan

[65] NTB SATU DATA

sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengidentifikasi risiko bencana.[66]

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah membentuk tim Relawan Tangguh di wilayah mereka. Pembentukan tim relawan ini melibatkan 50 peserta yang berasal dari berbagai desa. Tujuan utama pembentukan tim relawan ini adalah untuk memperluas cakupan kerja BPBD di kampung-kampung dalam menangani bencana, sehingga masyarakat dapat lebih mudah berkoordinasi dengan BPBD. Setiap peserta mewakili kampung yang rentan terhadap bencana, dengan jumlah peserta sebanyak 5 orang dari 10 desa yang berpartisipasi.

Para relawan telah menjalani pelatihan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Sepuluh desa yang terlibat dalam pelatihan dan pembentukan tim relawan ini adalah Suka Jadi, Pantai Tinjau, Babo, Bandar Khalifah, Kaloy, Rongoh, Simpang Kiri, Rantau Pakam, Gelung, dan Kampung Baru. Dalam pelatihan tersebut, mereka diberikan materi mengenai sistem peringatan dini berbasis masyarakat, pengelolaan posko, pendirian dapur umum, logistik dasar, evakuasi, dan penyelamatan. Materi-materi tersebut disampaikan oleh perwakilan dari BPBD, PMI, TNI, Polri, dan SAR.[67]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

---

[66]PPID Aceh Tamiang, "*BPBD Aceh Tamiang Gelar Pelatihan Mitigasi Bencana Menuju Destana",https://ppid.acehtamiangkab.go.id/news/post/bpbd-aceh-tamiang-gelar-pelatihan-mitigasi-bencana-menuju-destana,* diakses pada jumat, 30 September 2022, dikutip pada 25 mei 2023.

[67]Redaksi, *"BPBD Aceh Tamiang bentuk tim relawan desa",https://www.ajnn.net/news/bpbd-aceh-tamiang-bentuk-tim-relawan-desa/amp.html* diakses pada 2 September 2014, diakses pada 25 mei 2023.

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada keseluruhan bab yang membahas mengenai upaya pemerintah Daerah dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah daerah dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang
   a. Komunikasi yang terbangun dalam mengurangi risiko banjir di Aceh Tamiang terjalin dengan baik seperti membicarakan perihal proposal untuk membangun tanggul ke kantor staff kepresidenan, dan melalui program BPBD yaitu Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) rutin setiap tahunnya melakukan kegiatan Sosialisasi guna mengurangi resiko bencana banjir.
   b. Penggunaan Sumber Daya.
      (a) sumber daya manusia (staff) : Sampai hari ini, SDM dan personil BPBD masih belum memadai. Jabataan fungsional untuk setiap bidang di BPBD belum terpenuhi. Tenaga ahli juga belum memadai.

(b) sumber daya anggaran (dana) : Terkait anggaran yang disediakan untuk rekontruksi pasca bencana banjir dalam pengelolaannya tidak mencukupi.

(c) sumber daya sarana dan prasarana : Fasilitas yang ada cukup memadai dengan tersedianya alat berat seperti eskavator.

(d) sumber daya kewenangan : Kewenangan Pemerintah Daerah hanya mendorong, mengusulkan dan melakukan tindakan-tindakan minimal seperti penanaman vetiver dan bambu di pinggiran sungai.

c. Disposisi ataupun sikap pelaksana dalam mengurangi resiko banjir sudah cukup baik dengan menyiapkan beberapa strategi mulai dari prabencana, pada saat terjadinya bencana, dan pada saat pasca bencana.

d. Birokrasi ataupun Lembaga yang membantu pemeritahan dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang ini tergolong baik dengan dibentuknya lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang.

2. Hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang sangat bersinegritas. Pihak BPBD mempunyai hubungan kerjasama dengan Kepala Desa dan PMI, SAR, BASARNAS, TAGANA. Tidak hanya itu, Pemerintah Daerah Aceh Tamiang bersama BPBD dan juga masyarakat membuat Desa Tangguh dan Relawan Tangguh.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki saran yaitu:

1) Untuk BPBD, perlu kedepannya BPBD terus memperbaharui Tenaga ahli yang bisa memenuhi kapasitas sesuai kebutuhan bidang keahlian.
2) Pemerintah Daerah perlu terus mengadakan edukasi terkait bencana banjir dan mengurangi adanya perubahan lahan yang diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Al Munir. (2023). Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme, dan Ekosentrisme. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan, 9(1), 40.

Harahap, M. R. (2022). Analisis Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, 2.

Harahap, N. (2014). Penelitian Kepustakaan. Jurnal Iqra, 08(01), 68.

Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. Jurnal at-taqaddum, 8(1), 23.

Maros, F., et al. (2016). Penelitian Lapangan (Field Research). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 5.

Munawarah, R., & Maulidian, M. O. R. (2022). Mitigasi Bencana Banjir di Desa Teluk Halban Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Pendidikan Geosfer, 7(1), 92-92.

Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Wacana, XIII(2), 178-179.

Nugroho, et al. (2021). Kajian Faktor Penyebab Banjir Dalam Perspektif Wilayah Sungai: Pembelajaran Dari Sub Sistem Drainase Sungai Beringin. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 17(2), 122.

Qodriyatun, S. N. (2020). Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja. Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(1), 32.

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. Jurnal keperawatan Indonesia, 11(1), 35-36.

Ratnaningsih, et al. (Modul 1). Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data dan Penyajian Data, 20.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah, 17(33), 91.

Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, 9(2), 57-65.

Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 429.

Sharon, G. (2021). Teori Wewenang Dalam Perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, *3*(1), 50-63.

Undang-Undang:

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 76 Tahun 2016.

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2010, *Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 (Pasal 20).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Website:

Aceh Tamiang Pemkab. (diakses pada 11 Mei 2018). Sejarah Aceh Tamiang. Retrieved from https://www.acehtamiangkab.go.id/selayang-pandang/sejarah-aceh-tamiang.html?fb_comment_id=1751711581582559_1815606605193056 (dikutip pada 9 Mei 2023).

Admin Pengairan Aceh. (Diakses pada Jum'at, 19 Mei 2023). Warga Pesisisr Aceh Tamiang Gembira Dibangunnya Tanggul Sungai. Retrieved from

https://pengairan.acehprov.go.id/berita/kategori/berita-kegiatan/warga-pesisir-aceh-tamiang-gembira-dibangunnya-tanggul-sungai (Dikutip pada 27 Juni 2023).

bphn.go.id. (diakses pada Agustus 2011). AE UU NO 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Retrieved from https://bphn.go.id/data/documents/AE%20UU%20NO%2024%20Tahun%202007%20Tentang%20Penanggulangan%20Bencana.pdf (dikutip pada 1 Juni 2023).

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang.

Harison, D. (Rabu, 21 Desember 2022). Tanggul Jebol Bertambah di Pesisir Aceh Tamiang. Antara News. Retrieved from https://aceh.antaranews.com/berita/319738/tanggul-jebol-bertambah-di-pesisir-aceh-tamiang (diakses pada 14 januari 2023).

Majalah Sawit Indonesia. (diakses pada 14 september 2021). Aceh Tamiang ditargetkan Menjadi kabupaten Penghasil Sawit Berkelanjutan. Retrieved from https://sawitindonesia.com/aceh-tamiang-ditargetkan-menjadi-kabupaten-penghasil-sawit-berkelanjutan/ (diakses pada tanggal 14 jan 2023).

NTB SATU DATA.

PPID Aceh Tamiang. (jumat, 30 September 2022). BPBD Aceh Tamiang Gelar Pelatihan Mitigasi Bencana Menuju Destana. Retrieved from https://ppid.acehtamiangkab.go.id/news/post/bpbd-aceh-tamiang-gelar-pelatihan-mitigasi-bencana-menuju-destana (diakses pada 25 mei 2023).

Profil PKP Kab. Aceh Tamiang. (diakses pada 12 September 2022). Retrieved from https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tamiang/ (dikutip pada 9 Mei 2023).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Redaksi. (2 September 2014). BPBD Aceh Tamiang bentuk tim relawan desa. AJNN. Retrieved from https://www.ajnn.net/news/bpbd-aceh-tamiang-bentuk-tim-relawan-desa/amp.html (diakses pada 25 mei 2023).

Setyadi, A. (2022, 03 November). Banjir Aceh Tamiang Diduga Akibat Alih Fungsi Hutan Jadi Kebun Sawit. Detik.com. Retrieved from https://www.detik.com/sumut/berita/d-6386025/banjir-aceh-tamiang-diduga-akibat-alih-fungsi-hutan-jadi-kebunsawit-/amp (diakses pada 14 januari 2023).

World Agroforestry (ICRAF). (dikutip pada tanggal 14 jan 2023). Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Aceh Tamiang: Strategi dan Rencana Kegiatan Sustainable Farming In Tropical Asian Landscape (SFITAL). Retrieved from https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publication/23164/.

Yuniarto, N. I. (23 Januari 2023). Perbaiki Tanggul Jebol, BPBD Aceh Tamiang Kerahkan 2 Alat Berat. Retrieved from https://aceh.inews.id/amp/berita/perbaiki-tanggul-jebol-bpbd-aceh-tamiang-kerahkan-2-alat-berat/akk (diakses pada 30 Juni 2023).

Skripsi:

Aulia, D. N. I. (2019). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Fhadilla, N. (2020). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Jambi (Skripsi). Fakultas Syariah Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Firdaus, D. A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Latief, A. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Rustam, R. (Skripsi). Kerjasama Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Luwu Utara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Muhammadiyah Makassar, hlm. 2.

Setyowati, S. D. (2022). Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menghadapi Bencana Banjir Di Kabupaten Bondowoso (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

Universitas Muhammadiyah Malang. (2023). Skripsi, BAB I. Retrieved from http://eprints.umm.ac.id/33804/2/jiptummpp-gdl-wawanpirdi-44727-2-bab_i.pdf (dikutip pada 17 Januari 2023, hlm. 16).

Maula Masthura, (2022) *"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir di Aceh Utara",* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Buku:

Adnyana, I. M. (2020). Penganggaran Perusahaan. Penerbit Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), hlm. 1.

Agus Subianto. (2020). Kebijakan Publik (Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi). Surabaya: Diterbitkan oleh Brilliant, hlm. 70.

Hayat, H. (2018). Kebijakan publik. Malang: Penerbit Empatdua Media, hlm. 18.

Istihora, S. K., & Basri, A. H. (2020). Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat Kesiapsiagaan Banjir. Gresik: Diterbitkan oleh CV. Jakad Media Publishing, hlm. 5.

Larasati, S. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerbit Deepublish, hlm. 1-5.

Marfai. (2019). Pengantar Etika Lingkungan dan Kearifan lokal. Penerbit Universitas Gadjah Mada, hlm. 4.

Sahya Anggara, S., M.Si. (2018). Kebijakan publik. Bandung: Penerbit Pustaka Setia, hlm. 35.

Winarno. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Diterbitkan oleh CAPS (Center Of Academic Publishing Service), hlm. 35-37.

Yulaewati, dkk. (2008). Mencerdasi Bencana. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 4-9.

Ilmar Aminuddin. "Hukum Tata Pemerintahan". (Jakarta, Kencana: 2014). hal: 102-103.

Rahayu, A.S. (2022), "Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya", Peneribit: Sinar Grafika, Hal: 1.

Jones, C. O. (1977). Public Policy: Pengantar Kebijakan Publik. *Terj: Ricky Istamto. Jakarta: Raja Grafindo Persada*.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan Analis Mitigasi Bencana BPBD Aceh Tamiang pada Selasa, 2 Mei 2023

Gambar 2. Wawancara dengan Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik pada Senin, 3 Juli 2023

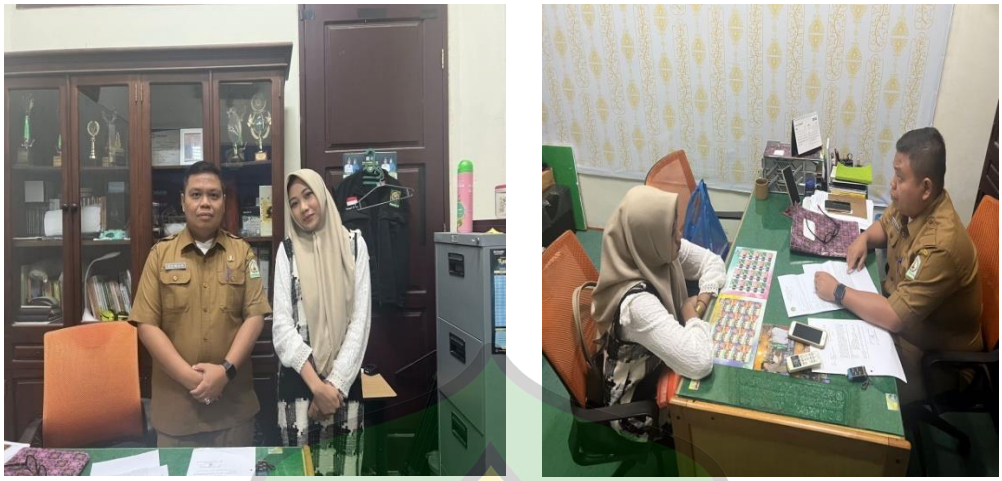

Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Hubungan Masyarakat Setda Aceh Tamiang pada Senin, 3 Juli 2023.

Gambar 4. Peringatan Memasuki Kawasan Rawan Bencana Banjir

Gambar 5. Petunjuk Jalur Evakuasi

Gambar 6. Petunjuk kawasan rawan bencana banjir

Gambar 7. Tugu Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang

Gambar 8. Banjir yang terjadi di Aceh Tamiang pada 2021

Gambar 9. Banjir yang membuat Jalan Nasional Banda Aceh-Medan lumpuh Pada November 2022

Gambar 10. Banjir di Desa Alur Manis, Kec.Rantau Kab.Aceh Tamiang Pada November 2022

No.	Identitas Informan	Pertanyaan
1.	Nama : Azwanil, S. ST, M.I.Kom Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Humas Setda Kabupaten Aceh Tamiang.	1. Sejauh mana kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang? 2. Kebijakan apa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengurangi resiko banjir? 3. Apa penyebab utama banjir terus menerus terjadi di Aceh Tamiang? 4. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan solusi jangka panjang untuk mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang? 5. Bagaimana sinegritas antara Pemprov Aceh dengan Pemkab Aceh Tamiang dalam mengurangi resiko banjir? 6. Bagaimana hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir?
2.	Nama : Drs. Bambang Supriyanto, MM. Jabatan : Kepala Bidang Kederaruratan dan Logistik	1. Bagaimana peran BPBD dalam mengatasi bencana banjir? 2. Bagaimana upaya prabencana yang dilakukan oleh BPBD, seperti

	BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.	pencegahan, mitigasi/pengurangan, kesiapsiagaan? 3. Bagaimana proses tanggap darurat yang dilakukan oleh BPBD? 4. Upaya apa yang dilakukan BPBD saat pasca bencana banjir? 5. Apakah BPBD melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir? 6. Bagaimana hubungan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir?
3.	Nama : Suci Faramudita Sari, M. Han. Jabatan : Analis Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.	1. Apakah anggaran BPBD dalam menanggulangi bencana banjir memadai? 2. Adakah anggaran yang disediakan untuk rekontruksi pasca bencana banjir dan bagaimana pengelolaannya? 3. Sejauh mana kewenangan pemerintah daerah aceh tamiang dalam penanggulangan bencana? 4. Bagaimana sinegritas antara Pemprov Aceh dengan Pemkab Aceh tamiang dalam menanggulangi bencana banjir? 5. Bagaimana peran serta masyarakat

		dalam penanggulangan bencana banji? 6. Apakah pihak BPBD pernah mengadakan sosialisasi mengenai kebencanaan dan cara penanggulangan bencana banjir? 7. Apakah pihak BPBD punya hubungan kerjasama dengan LSM? 8. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BPBD pasca bencana banjir? 9. Apakah sumber daya manusia atau staff di BPBD Aceh Tamiang memadai dan mencukupi?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

RIWAYAT HIDUP

4. Nama : Imelda Natsya
5. Tempat/Tanggal Lahir : Kejuruan Muda, 11 Maret 2001
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Agama : Islam
8. Alamat : Lorong Jambu, Darussalam, Banda Aceh
9. Orang Tua,
   a. Nama Ayah : Tugiman
   b. Nama Ibu : Suprapti
   c. Alamat : Pondok Putih, Kec Tenggulun, Kab Aceh Tamiang

7. Riwayat Pendidikan,
   a. SD N 5 Kampung Selamat, Aceh Tamiang
   b. SMP N 5 Simpang Kiri, Aceh Tamiang
   c. SMA N 2 Patranusa Manyak Payed, Aceh Tamiang
8. Pengalaman Organisasi,
   a. Ketua Humas, Informasi dan Komunikasi Himapol Fisip Uin Ar-raniry Periode 2022-2023

جامعة الرانري
AR-RANIRY